

# PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN MADIUN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya sehingga Dokumen Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Pengukuran Kinerja ini disusun sebagai bentuk pencapaian kinerja Kepala Badan, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan beberapa kekurangan dalam penyusunan Evaluasi Internal ini, sehingga saran dan masukan sangat kami harapkan. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait dalam penyusunan Evaluasi Internal ini.

Madiun, Desember 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN MADIUN**



**Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620801 198203 1 006

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan capaian kinerja, hasil kegiatan dibandingkan dengan target yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja Bakesbangpol Dalam Negeri Kabupaten Madiun merupakan implementasi dari penjabaran capaian kinerja perangkat badan. Dengan adanya pengukuran kinerja ini diharapkan tujuan dari kegiatan pada Bakesbangpol Dalam Negeri Kabupaten Madiun dapat diwujudkan secara sistematis, terencana dan menghasilkan pencapaian target yang terukur.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari pengukuran kinerja adalah :

- a. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan yang maksimal sebagai tugas dan fungsinya.
- b. Mengidentifikasi berbagai pemborosan anggaran sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
- c. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pencapaian sasaran kinerja.

Dari beberapa pengertian dan penjabaran tentang pentingnya pengukuran kinerja yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

## BAB II

### EVALUASI KINERJA OPD

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Dalam rangka mewujudkan komitmen kinerja tahun 2019 sebagaimana uraian tersebut di atas, salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan kebijakan Bakesbangpol Dalam Negeri Kabupaten Madiun adalah masalah keuangan. Kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai, sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut ini adalah hasil pengukuran kinerja antara target sasaran dengan anggaran dan hasil evaluasi internal Bakesbangpol Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Pengukuran Kinerja Anggaran Tahun 2019

Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian Kinerja	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran Tahun 2019	% Capaian Anggaran	Keterangan Efisiensi (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
100%	67%	67%	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	2.123.999.350	1.878.341.750	88,43	245.657.600
							<i>Efisien</i>
84%	84%	100%	Program Pendidikan Politik Masyarakat	113.731.950	79.011.000	69,47	34.720.950
							<i>Efisien</i>
100%	100%	100%	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Dan Kehidupan Beragama	355.235.200	326.032.000	91,78	29.203.200
							<i>Efisien</i>

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun merupakan implementasi dari penjabaran capaian kinerja disandingkan dengan penggunaan anggaran pada Dinas Pengendalian Pendudukan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan adanya pengukuran kinerja ini diharapkan tujuan dari kegiatan pada OPD dapat diwujudkan secara sistematis, terencana dan menghasilkan pencapaian target yang terukur. Untuk dapat bersaing, organisasi membutuhkan sistem informasi yang berkemampuan menangkap informasi secara cepat dan efektif. Meskipun analisis catatan keuangan adalah penting, tetapi perhitungan tersebut kurang menyediakan informasi yang akurat mengenai kemampuan organisasi. Informasi yang diukur dalam satuan keuangan merupakan hasil dari keputusan masa lalu. Pentingnya pengukuran kinerja non keuangan disebabkan karena organisasi menghadapi perubahan lingkungan secara cepat. Alat pengukuran kinerja merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Alat pengukuran kinerja dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : alat ukur kinerja keuangan dan alat ukur kinerja non keuangan.